

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Luzatty (2011) “Analisis Pengaruh NPL (Non Performing Loan) dan CAR (Capital Adequacy Rasio) Terhadap Penyaluran Kredit pada BPR Konvensional di Wilayah Jawa Tengah Periode Desember 2011”. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi BPR konvensional di wilayah Jawa Tengah pada periode desember 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Sementara uji hipotesis menggunakan uji t-test untuk menguji pengaruh variabel secara parsial serta uji F-test untuk menguji pengaruh variabel secara simultan dengan tingkat significant 10%. Hasil regresi menunjukkan bahwa NPL (Non Performing Loan) dan CAR (Capital Adequacy Rasio) secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada BPR Konvensional di Wilayah Jawa Tengah. NPL (Non Performing Loan) dan CAR (Capital Adequacy Rasio) berpengaruh negative dan significant terhadap penyaluran kredit. Sedangkan pada penelitian yang saya ambil saya mengembangkan variabel menjadi 3 variabel yaitu DPK (Dana Pihak Ketiga), NPL (Non Performing Loan), dan BI rate untuk mengetahui penyaluran kredit.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Khoirul (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisi Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit oleh BPR sewilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri” yang bertujuan untuk menguji apakah dana pihak ketiga, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor dana pihak ketiga, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga kredit secara parsial terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sewilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan uji F, uji t, dan  $R^2$  (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit di BPR sewilaya Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh dalam penyaluran kredit di BPR sewilaya Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Sebagaimana dengan hasil penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui apakah variabel tersebut juga berpengaruh terhadap BPR di kota Probolinggo namun dengan mengganti variabel tingkat inflasi dengan variable non performing loan (NPL) untuk mengembangkan resiko kredit apa saja yang terjadi di BPR kota Probolinggo.

Gede (2015) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), BI rate dan Non Performing Loan (NPL) terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK), BI rate dan non performing loan (NPL) terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menyatakan bahwa DPK, BI rate dan NPL mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014, sedangkan secara parsial diperoleh bahwa DPK, BI rate dan NPL mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014. Tujuan peneliti mengambil penelitian ini untuk membandingkan apakah dengan variabel yang sama hasil penelitian juga menghasilkan hasil yang sama atau berbeda dan penelitian yang di lakukan oleh Gede ini hanya mencakup penyaluran kredit modal kerja sehingga diharapkan penelitian yang saya lakukan dapat menjadi bahan pengembangan terhadap penyaluran kredit yang lebih luas.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Kredit**

#### **a. Sasaran dan tujuan kredit**

Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman terarah dan menghasilkan pendapatan. aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah bahwa maksudnya adalah pengguna kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah diserahkan, terarah maksudnya bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur dan masyarakat umumnya. Sedangkan menurut Kasmir (2010:110) tujuan pemberian kredit minimal akan memberikan manfaat pada:

- Pertama adalah bagi bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrument bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank.
- Kedua adalah bagi debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.

- Ketiga adalah bagi masyarakat (Negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterahkan masyarakat. Di samping itu bagi Negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrument moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

#### **b. Jenis Kredit**

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat di kelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi.

Menurut Kasmir (2008:85) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat berbagai segi adalah sebagai berikut:

##### **1) Dilihat dari Segi Kegunaan**

Maksud dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. *Kredit investasi*

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perkuasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. *Kredit modal kerja*

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2) *Dilihat dari Segi Tujuan Kredit*

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakai suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

a. *Kredit produktif*

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

*b. Kredit konsumtif*

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

*c. Kredit perdagangan*

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

*a. Kredit jangka pendek*

Kredit ini merupakan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

*b. Kredit jangka menengah*

Jangka waktu kredit berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. *Kredit jangka panjang*

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) *Dilihat dari Segi Jaminan*

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus diindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

a. *Kredit dengan jaminan*

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang dibeikan calon debitur.

b. *Kredit tanpa jaminan*

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama barhubungan dengan bank yang bersangkutan.

**c. Risiko Kredit**

Dalam rangka meningkatkan perolehan laba perbankan perlu mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya dimasa yang akan



datang. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi meliputi sebagai berikut menurut Kasmir (2008:114):

1) Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko ekonomi (inflasi, daya beli), risiko kompetisi (pesaing dalam an asing) dan risiko peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

2) Risiko Manajemen

Risiko ini berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal), seperti risiko organisasi, risiko kemampuan bank dalam melayani nasabah atau lainnya, dan resiko kegagalan terhadap usaha yang dijalankan.

3) Risiko penyerahan

Risiko ini juga terpengaruh oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko perkembangan teknologi dan lainnya.

4) Risiko Keuangan

Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko leverage..

## 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Produk bank yang sangat populer di kalangan masyarakat dan dunia perbankan secara umum ada tiga macam yaitu giro, tabungan dan deposito. Menurut Kasmir (2010:177) apapun pengembangan produk yang dilakukan bank untuk menghimpun dana selalu berbasis pada ketiga produk tersebut.

Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan sebagai berikut:

- Giro (*demand deposits*)
- Deposito (*time deposits*)
- Tabungan (*saving*)

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat, sedangkan bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dapat dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek.

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam

kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal.

Deposito merupakan simpanan atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dan bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Deposito berjangka tidak bisa diperdagangkan, namun bisa digunakan sebagai jaminan kredit.

Namun di Bank Perkreditan Rakyat hanya ada dua sumber dana dari masyarakat, yaitu berupa Tabungan dan Deposito.

### **3. Non Performing Loan (NPL)**

Menurut Greydi (2013:4) Non Performing Loan (NPL) mencerminkan resiko kredit, dimana semakin kecil NPL semakin kecil pula kredit yang di tanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisi terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Made,2013).

Menurut Mudrajat Kuncoro (2002:462) “Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikannya”. Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2005) “kredit macet yaitu pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikannya”. NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPL diketahui dengan cara menghitung pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Peningkatan NPL yang terjadi pada masa krisis secara langsung berpengaruh terhadap menurunnya likuiditas bagi sektor perbankan, karena tidak ada uang masuk baik yang berupa pembayaran pokok ataupun bunga pinjaman dari kredit-kredit yang macet. Sehingga bila hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat.

NPL yang tinggi mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena menurunkan perputaran dana

bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. dengan kata lain NPL menurunkan probabilitas bank. NPL juga memaksa bank membentuk sejumlah dana cadangan guna menjaga likuiditas dan solvabilitas bank untuk melindungi deposan. Semakin besar NPL semakin besar *opportunity cost* yang harus di tanggung oleh bank. Oleh karena itu, NPL harus diupayakan serendah mungkin. BI mengaturnya dengan menetapkan ketentuan bahwa pada juni 2003, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai NPL max 5% (Nasirudin,2005).

Besarnya kredit bermasalah menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Sedangkan menurut Riyadi (2006;161), semakin besar tingkat kredit bermasalah menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan kreditnya.

Aspek ini bertujuan untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPL gross kurang dari 5%.

Secara matematis, NPL dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{penyaluran kredit bank}}{\text{TotalKredit}} \times 100\%$$

Sumber : Dendawijaya

#### 4. BI rate

BI rate merupakan tingkat bunga dengan tenor satu bulan yang di umumkan oleh Bank Indonesia secara periodic yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Secara sederhana, BI Rate merupakan indikasi level tingkat bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi (Bank Indonesia).

BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) berada disekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga BI Rate diharapkan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga simpanan, dan suku bunga lainnya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Sasaran akhir suatu kebijakan moneter dalam arti luas mencakup stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran, stabilitas financial markets dan stabilitas pasar valuta asing. Secara ideal, semua sasaran tersebut dapat di capai secara bersamaan. Namun dalam

prakteknya di Indonesia seringkali mengandung unsure-unsur yang kontradiktif. Misalnya usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat berdampak negative pada kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran.

Menyadari hal ini, Bank Indonesia memfokuskan sasaran kebijakan moneternya pada stabilitas nilai Rupiah, yang dicapai melalui stabilitas harga (inflasi) dan stabilitas nilai tukar. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut maka diperlukan suatu respon kebijakan untuk mengendalikan situasi moneter dan pasar keuangan agar tetap berada di koridor yang diinginkan. Respon kebijakan yang dimaksud dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI rate, sebagai sinyal kebijakan moneter untuk mengarahkan dan mempengaruhi suku bunga yang berlaku di pasar keuangan. Arah (respon) kebijakan moneter secara konsisten ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi jangka menengah yang rendah dan stabil (inflation targeting), yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Contohnya Ketika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan 126% pada bulan Oktober 2005 Bank Indonesia merespon kondisi tersebut dengan menaikkan BI Rate sebesar 100 basis points (bps) 10% menjadi 11%. Ketika indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang positif seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi cukup terkendali, dan stabilitas

nilai rupiah tetap terjaga, pada tanggal 6 Desember 2007, Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 25 bps dari 8,25% menjadi 8%.

## **5. Pengaruh DPK, NPL, dan BI Rate terhadap penyaluran kredit**

### **a. Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Kredit**

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat digunakan bank untuk disalurkan pada pos-pos yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Selain untuk menghasilkan pendapatan, pengalokasian DPK bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas bank tetap aman (wanda, 2015).

Menurut Ismail (2010:43) bahwa tersedianya dana pihak ketiga yang tinggi akan membuat kesempatan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit akan semakin besar. Sedangkan menurut Frianto Pandia (2012: 1) semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank. Menurut Dendawijaya (2005:49) dana pihak ketiga merupakan sumber dana utama yang dimiliki



perbankan, dimana dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediary yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, (2012) juga menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit dan didukung juga oleh penelitian Tomola M. Obamuyi (2013).

**H1 : DPK berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit.**

#### **b. Pengaruh NPL terhadap Penyaluran Kredit**

Tingginya angka kredit bermasalah (*non-performing loan*) menyebabkan perbankan enggan menyalurkan kredit akibat tingginya resiko yang ditanggung oleh perbankan. Dalam kondisi tingkat kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan permodalan bank memburuk. Menurut mahsud (2004:146),

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:427) Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan rasio dari risiko kredit, dimana Non Performing Loan ini adalah sebuah kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank. Karena dengan kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank yang selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba.

NPL yang tinggi mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena menurunkan perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dengan kata lain NPL menurunkan profitabilitas bank. NPL juga memaksa bank membentuk sejumlah cadangan guna menjaga likuiditas dan solvabilitas bank untuk melindungi depositan. Semakin besar NPL semakin besar opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, NPL harus diupayakan serendah mungkin. BI mengaturnya dengan menetapkan ketentuan bahwa pada Juni 2003, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai rasio NPL max 5 % (Nasiruddin, 2005).

Tingginya angka kredit bermasalah (non-performing loan) menyebabkan perbankan enggan menyalurkan kredit akibat tingginya risiko yang ditanggung oleh perbankan. Dalam kondisi tingkat kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan permodalan bank memburuk. Menurut Mahsud (2004:146).

*Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi resiko jika terjadi kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Saat kredit bermasalah tinggi, perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut berkurang. Pada prakteknya besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit yang dilakukan oleh perbankan.

Besarnya kredit bermasalah menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit karena semakin besar tingkat kredit bermasalah menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan yaitu *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi atau melebihi ketentuan maksimum 5% akan mempengaruhi ekspansi kredit sebuah lembaga perbankan, dimana kredit macet tersebut menghambat operasional dimana yang seharusnya dapat menambah penyaluran kredit.

**H2 : NPL berpengaruh negatif terhadap Penyaluran Kredit.**

### **c. Pengaruh BI rate terhadap Penyaluran Kredit**

Dengan meningkatnya BI rate maka akan diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga sehingga pemilik dana cenderung akan menyimpan dananya pada bank dengan harapan memperoleh bunga yang tinggi, sedangkan pihak yang kekurangan dana akan enggan melakukan pinjaman karena mempertimbangkan tingkat bunga yang tinggi. Dengan demikian permintaan akan uang berkurang sehingga permintaan akan kredit menurun. Menurut Mishkin (2010), kenaikan suku bunga akan berdampak pada kerugian modal yang besar atas obligasi jangka panjang. Selanjutnya kerugian akan menyebabkan kegagalan bank dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi, yaitu

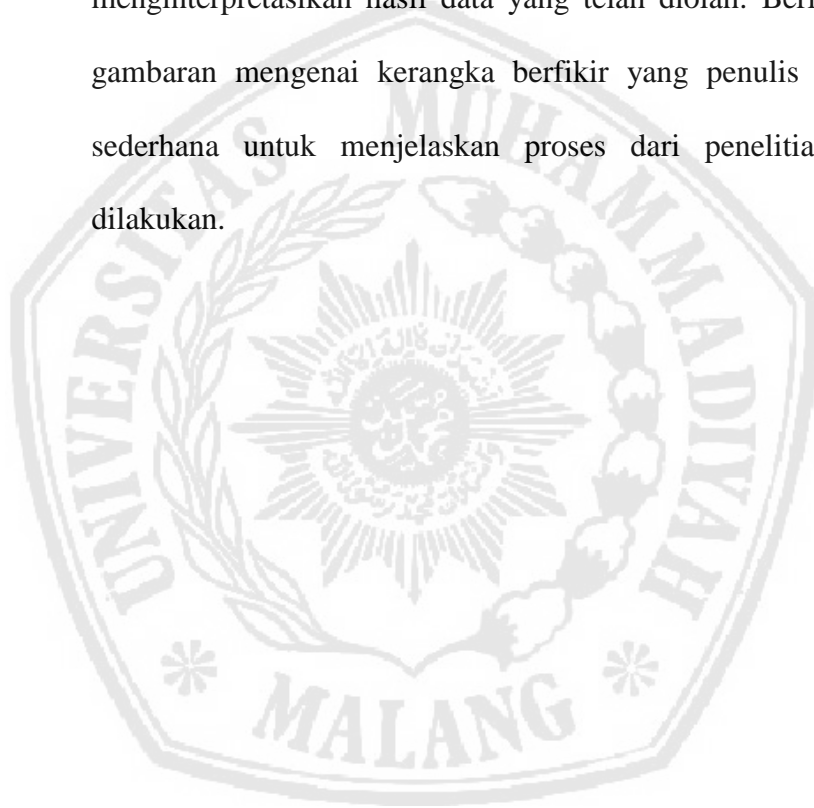
kegiatan penyaluran kredit. Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan likuiditas. Saat tingkat *BI rate* diturunkan kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan diharapkan akan meningkatkan permintaan uang untuk berbagai aktifitas ekonomi. Pada saat tingkat suku bunga turun, maka pemilik dana akan lebih memilih berinvestasi daripada menabung dengan perolehan bunga yang rendah. Di sisi lain, dengan turunnya suku bunga akan menarik masyarakat untuk mengambil pinjaman. Maka dapat disimpulkan jika *BI rate* berhubungan negative dengan jumlah kredit yang disalurkan.

Menurut Veithzal Rivai (2013:109) penetapan suku bunga kredit merupakan faktor yang sangat penting karena dalam pasar yang bersaing ketat, suku bunga kredit akan sangat berpengaruh dalam proses penyaluran kredit. Sedangkan menurut Bagust (2014) semakin tinggi tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank akan menyebabkan nasabah tidak tertarik untuk menggunakan jasa pelayanan perbankan tersebut dan beralih kepada bank lain yang mampu memberikan bunga pinjaman lebih rendah. Hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gede dan Surya, 2015) bahwa *BI rate* berhubungan positif signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di provinsi bali.

**H3 : BI rate berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit.**

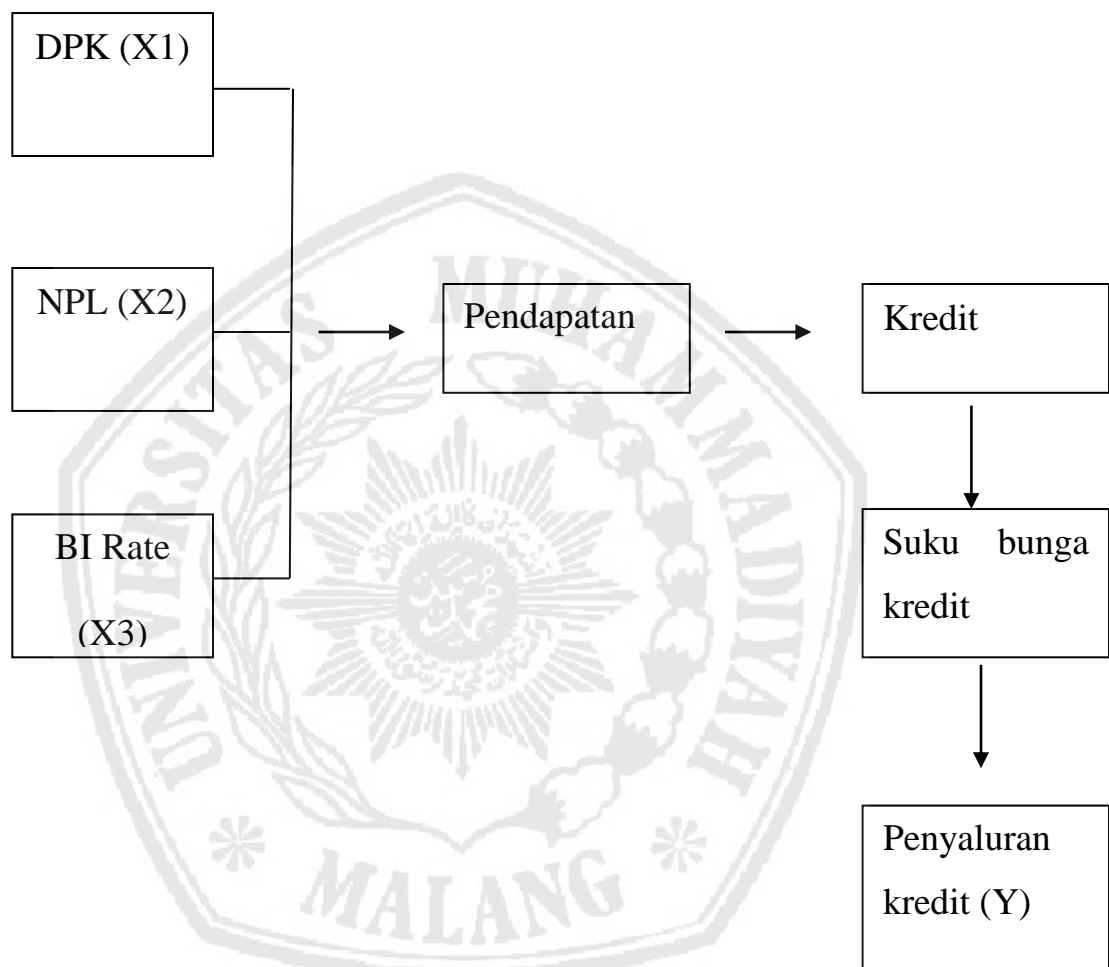
**C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan suatu proses berawal dari peneliti memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Berikut ini adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang penulis bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses dari penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran Hipotesis



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara mengenai perilaku, fenomena atau suatu keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan paling spesifik. Dengan kata lain hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara yang disusun oleh peneliti yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh. Berdasarkan kerangka pemikiran mengenai “Analisis Penyaluran Kredit di BPR kota Probolinggo”, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

1. H1: DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.
2. H2: NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.
3. H3: BI rate berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit